



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**SINERGI PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

NOMOR : 01/NK/PEM-SETDA-BJB/2026

NOMOR : 03/ORI-MOU/I/2026

PPada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh enam (27-01-2026)**, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ERNA LISA HALABY** : Wali Kota Banjarbaru dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 - 2408 Tahun 2025 tanggal 17 Juni 2025, yang berkedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 10. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163);
 11. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003); dan
 12. Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1091); dan

13. Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 260).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Pemerintah Kota Banjarbaru agar dapat berjalan adil, transparan, dan bebas dari maladministrasi, diperlukannya dukungan dan peran dari Ombudsman yang bertugas untuk melakukan pengawasan, investigasi, dan edukasi guna penyelenggaraan pelayanan publik dapat tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Ombudsman daerah memberi rasa aman sekaligus memperkuat demokrasi di tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan pencegahan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** berada di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. Pencegahan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. Pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- d. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- e. Kerja Sama Sinergi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mendorong Perangkat Daerah memenuhi Standar Pelayanan Publik (SPP) dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. Mendorong Perangkat Daerah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;

- c. Melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/aduan masyarakat;
 - d. Menyediakan data dan/atau informasi sebagai bahan kerja **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan;
 - f. Melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan publik dengan melibatkan **PARA PIHAK** yang berkaitan; dan
 - g. Menerima pendampingan secara berkala dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan pencegahan maladministrasi dengan pengawasan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - b. Melakukan pengawasan Sinergi Peningkatan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. Melakukan penyelesaian laporan masyarakat terkait program sinergi peningkatan pelayanan publik yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
 - d. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Kerja sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memuat pelaksanaan mekanisme teknis program kegiatan yang akan disinergikan **PARA PIHAK**.
- (2) Rencana Kerja Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** yang membidangi program

kegiatan yang disinergikan, dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana Kerja Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK** terkait paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENGAKHIRAN SINERGI

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum

tanggal berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 11

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini serta tidak diperkenankan untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain kecuali ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal ini tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
Alamat : Jalan Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru
Telepon : (0511) 4772569

Website : organisasi@banjarbaru.go.id
Email : organisasibanjarbaru@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat : Jalan Letjend. S. Parman Nomor 57 Banjarmasin
Telepon : (0511) 3367412, Whatsapp +62 811-5137-375
Website : www.ombudsman.go.id
Email : kalsel@ombudsman.go.id

- (3) Penggantian atau perubahan alamat atau hal-hal terkait lainnya sehubungan dengan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.
- (4) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada **PARA PIHAK** dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan maka dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi atau bentuk lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, akan disepakati dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum Nota Kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 16

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang terjadi di wilayah kerja **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami kejadian Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keadaan kahar agar dapat ditanggapi dan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 17
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta dibubuhi cap, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KESATU,



ERNA LISA HALABY

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

NOMOR : 01/NK/PEM-SETDA-BJB/2026

NOMOR : 03/ORI-MOU/I/2026

TANGGAL : 27 JANUARI 2026

RENCANA KERJA
SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penyelesaian Laporan	1. Percepatan penanganan laporan masyarakat melalui mekanisme propartif	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Terlaksananya Percepatan penanganan laporan masyarakat melalui mekanisme propartif	☐	☐	☐	☐	☐	Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		2. Pencegahan Maladministrasi	2. Percepatan penanganan laporan masyarakat melalui komunikasi narahubung dari masing-masing pihak (TRPP).		2. Terlaksananya Percepatan penanganan laporan masyarakat melalui komunikasi narahubung dari masing-masing pihak (TRPP).	☐	☐	☐	☐	☐		

			Program Kelurahan/Kecamatan bebas maladministrasi		Terlaksananya program kelurahan/kecamatan bebas makadministras							
			Program Rumah Sakit Prima Melayani		Terlaksananya program rumah sakit prima melayani							
			Program Sekolah Pelayanan Publik		Terlaksananya program sekolah pelayanan publik							
			Program Puskesmas Ramah Pelayanan Publik		Terlaksananya program puskesmas rumah pelayanan publik							
			Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelolaan Pengaduan (propartif)		Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas pengelolaan pengaduan (propartif)							
			Peningkatan Pelayanan Kelompok Rentan		Terlakasananya peningkatan pelayanan kelompok rentan Terlaksananya program pekan layanan publik							
			Program Pekan Layanan Publik		Terlaksananya program lierasi anti maladministrasi							

			Literasi Anti Maladministrasi									
			Program inovasi lainnya yang berdampak pada pencegahan maladministrasi		Terlaksananya program inovasi lainnya yang berdampak pada pencegahan maladministrasi							

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Meningkatnya Tatakelola Manajemen ASN	Meningkatnya Kualitas Pengadaan ASN							
			2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK									
			3. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN									
			4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepeg									

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN		Meningkatnya kualitas mutasi, rotasi dan promosi ASN							
3.	KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Meningkatnya kualifikasi sumber daya aparatur							
		2. Pengembangan Kompetensi ASN	1. Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		Meningkatnya Keterampilan dan Kapasitas ASN							
			2. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN									
			3. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional									
4.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN							
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur									

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
			Pembinaan Disiplin ASN									
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai									
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Tatakelola Manajemen ASN	Meningkatnya kompetensi teknis dan fungsional sumber daya aparatur							
		2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Meningkatnya kompetensi manajerial sumber daya aparatur							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
6.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Evaluasi Pemberhentian ASN	1. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 2. Pemberhentian		Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Kepegawian urusan pensiun							
7.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	3. Pengelolaan Mutasi ASN		Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Kepegawian selain urusan pensiun							
			4. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1. Pelaksanaan Konsultasi Publik 2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan tertib perencanaan							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kualitas Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah							
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Meningkatnya Tertib Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan		Meningkatnya Keselarasan Penyusunan Dokumen Perencanaan							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	N PEMBANGUNAN DAERAH	Pembangunan Manusia	Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5. Asistensi Penyusunan		Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD,		Meningkatnya Keselarasan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
			dan RKPD) 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat		Meningkatnya Keselarasan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
			Daerah Bidang Infrastruktur 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi	Meningkatnya Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		dan Pengkajian Peraturan	Pemerintahan Umum	Daerah	Peraturan							
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Meningkatnya Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan							
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga 2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 3. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertahanan 4. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika									
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2. Sosialisasi dan Diseminasi		Meningkatnya Inovasi Daerah							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
			Hasil-Hasil Kelitbangan									
5.	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	1. Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset 2. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan		Meningkatnya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan							
		Investasi dan Inovasi	1. Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi 2. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual		Meningkatnya Investasi dan Inovasi							

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	PROGRAM PENGELOLAAN	Keg. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Objek Pajak Baru							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah		Meningkatnya Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah							
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Keg. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Meningkatnya Objek Pajak Baru							
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Meningkatnya Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah							
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		1. Meningkatkan Pengawasan Kepada Wajib Pajak 2. Meningkatkan Kualitas edukasi perpajakan serta kepuasan pelayanan kepada masyarakat 3. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat							

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	PROGRAM	Perumusan	1. Penyusunan	Masih	Meningkatnya							

	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan	Rendahnya Tingkat Kewaspada an Dini Terhadap Isu Konflik	Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								
--	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 5. Pembentukan Paskibraka										
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan		Meningkatnya Cakupan Pendidikan Politik								

			Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran		Meningkatnya Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan								

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANG AN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Ketahanan		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama								
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan		Meningkatnya Deteksi Dini dan Cegah Dini Konflik							

			serta Penanganan Konflik di Daerah									
			4. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 2. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 3. Penyediaan Akses Internet	Meningkat nya kematangan Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik	Meningkatnya Layanan Informatika							
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		Meningkatnya kualitas layanan informasi							
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Terlaksananya tindak lanjut pengaduan							

		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik		Meningkatnya kualitas komunikasi publik							
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Diseminasi Informasi 2. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 3. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik 4. Penyusunan Konten		Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia yang memahami layanan informasi							
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia yang memahami layanan informasi							
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah	Penyediaan Akses Internet		Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang							

		Daerah Kabupaten/Kota			memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas							
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti							
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diseminasi Informasi		Jumlah informasi yang dipublikasikan							
		Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah							
		Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas							

	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Meningkat nya penyelengg araan keamanan informasi	Meningkatnya tata kelola keamanan informasi							
	PROGRAM PENYELENGG ARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar 2. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Meningkat nya Kematanga n Penyelengg araan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral							

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	PENGEMBANG AN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insenti f Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Meningkat nya Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya Peluang Usaha							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		Daerah Kabupaten/Kota										
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Meningkatnya Pemetaan Potensi							
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggara n Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		Meningkatnya Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal yang Komprehensif							
		Penyelenggara n Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal sebagai Upaya Peningkatan Daya Tarik Investasi Daerah							
3	PROGRAM PENGENDALIA N PELAKSANAA N PENANAMAN	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam		Meningkatnya Ketepatan Waktu pelaku usaha yang Menyampaikan LKPM							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	MODAL	Daerah Kabupaten/Kota	merealisasikan Kegiatan Usahanya 2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 3. Pengawasan Penanaman Modal									
4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Persentase jumlah data yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan							
5	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Kompetensi Petugas Pelayanan							
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di		Meningkatnya Pelaksanaan Pemantauan							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Pemenuhan Komitmen Perizinan							
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 2. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Terlaksananya Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Pelaku Usaha							

DINAS PENDIDIKAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2. Pembangunan Ruang	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar Nasional							

			Guru/Kepala Sekolah/TU 3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 4. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 9. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah 10. Pengadaan Mebel Sekolah 11. Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Peserta Didik Meningkatnya Kegiatan Pendampingan Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi pada Satuan Pendidikan								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

			perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 4. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 5. Pembangunan Laboratorium 6. Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 7. Pembangunan Fasilitas Parkir 8. Pembangunan Kantin Sekolah 9. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 10.Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 11.Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan		1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar Nasional 2. Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Peserta Didik 3. Meningkatnya Kegiatan Pendampingan Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi pada Satuan Pendidikan							

[illegible]

			Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 23.Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 24.Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 25.Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 26.Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 27.Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2. Pengadaan Mebel PAUD		1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang memenuhi							

[illegible]

			13.Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 14.Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 15.Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 16.Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 17.Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 18.Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi										
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kese taraan	1. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 2. Rehabilitasi Sedang/Berat		1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang								

[illegible]

			9. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 10. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 11. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 12. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik										
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 2. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 4. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		1. Meningkatnya literasi dan numerasi peserta didik 2. Meningkatnya Kompetensi Akademik dan Non-Akademik Peserta Didik								
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah	1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		Meningkatnya Kompetensi Akademik dan								

		Menengah Pertama	Sekolah Menengah Pertama 2. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 3. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 4. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Non-Akademik Peserta Didik								
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 4. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		1. Meningkatnya kualitas manajemen administrasi 2. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal 3. Meningkatnya Kondusifitas Lingkungan Pendidikan								
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		1. Meningkatnya kualitas manajemen administrasi 2. Meningkatnya								

			2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 4. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Pengelolaan Administrasi Keuangan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal 3. Meningkatkan Kondusifitas Lingkungan Pendidikan								
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		1. Meningkatkan kualitas manajemen administrasi 2. Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal								
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		1. Meningkatkan kualitas manajemen administrasi 2. Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan								

			Nonformal/Kesetaraan 3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal								
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 3. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 4. Pengembangan konten digital untuk pendidikan 5. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 6. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga		Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan								

			Kependidikan 7. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan										
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 4. Pengembangan konten digital untuk pendidikan 5. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 6. Fasilitasi		Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan								

			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
			7. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan										
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 3. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 4. Pengembangan konten digital untuk pendidikan 5. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 6. Fasilitasi Komunitas Belajar		Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan								

			Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
			7. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan										
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesenian	1. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 2. Pengembangan konten digital untuk pendidikan 3. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 4. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan								

5.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 2. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 3. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Meningkatnya Kompetensi Akademik dan Non-Akademik Peserta Didik								
6.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan								

	N DAN PENGEMBANG AN SISTEM AIR LIMBAH	Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lumpur Tinja Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
4.	PROGRAM PENGELOLAAN N DAN PENGEMBANG AN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase							
5.	PROGRAM PENGEMBANG AN PERMUKIMAN	Penyelenggaraa n Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kawasan yang mendapatkan pelayanan pengolahan air limbah							
6.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Negara dan Fasilitas Umum							

		Bangunan Gedung	Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
7.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Penyelenggaraa n Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya perencanaan penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai ketentuan							
8.	PROGRAM PENYELENGG ARAAN JALAN	Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kota	1. Pemeliharaan Rutin Jalan 2. Pemantauan dan Evaluasi 3. Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 4. Pembangunan Jalan 5. Rehabilitasi Jalan 6. Pemeliharaan Berkala Jalan 7. Rehabilitasi Jembatan 8. Rekonstruksi Jalan 9. Pembangunan Jembatan		Meningkatnya Kualitas Jalan, Bangunan Pelengkap Jalan dan Keterhubungan Jalan							
9.	PROGRAM PENGEMBANG AN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Terampil Konstruksi							

			atau Analis									
		Penyelenggaraa n Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 2. Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi		Meningkatnya validitas data informasi jasa konstruksi pada aplikasi							
		Pengawasa Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraa n dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1. Pengawasan dan Evaluasi 2. Tertib Penyelenggaraan Jasa 3. Konstruksi Kabupaten/Kota 4. Pengawasan dan Evaluasi 5. Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 6. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap tertib jasa konstruksi							
10.	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1. Penetapan Kebijakan dalam rangka 2. Pelaksanaan Penataan Ruang 3. Pelaksanaan Persetujuan 4. Substansi RDTR Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kualitas Rencana Tata Ruang dan Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang							

			5. Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang 6. Penetapan RDTR Kabupaten/Kota 7. Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 8. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 9. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		undangan bidang Penataan Ruang								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Peta Dasar 2. Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		Persentase Dokumen Perencanaan Ruang sesuai ketentuan								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	1. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 3. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan		Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang								

			Ruang									
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 2. Pelaksanaan Audit Tata Ruang 3. Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR 4. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK 5. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 6. Penilaian Perwujudan RTR		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang							

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	PROGRAM PERENCANAA	Rencana Perlindungan dan	1. Pengendalian Pelaksanaan	Menurunnya pencemaran	meningkatnya rencana							

	N LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	RPPLH Kabupaten/Kota 2. Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	lingkungan	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)							
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pemantauan dan Evaluasi KLHS		terlaksananya peninjauan RPPLH Kabupaten/ Kota Kembali							
2.	PROGRAM PENGENDALI AN PENCEMARA N DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 2. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK 3. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 4. Penyusunan dokumen status lingkungan		Meningkatnya Pencegahan/Pence maran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup							

			hidup daerah									
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Meningkatnya Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup							
3.		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 2. Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota		Meningkatnya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup							
4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)							

			4. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan									
5.	PROGRAM PENGENDALI AN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)		Meningkatnya pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)							
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 2. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 3. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait		Meningkatnya Kepatuhan usaha dan /atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan							

			Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
7.	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH							
8.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 3. Peningkatan		Meningkatnya Kapasitas SDM dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup							

	MASYARAKAT	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat									
9.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		Meningkatnya Penyelesaian terhadap kasus lingkungan Hidup							
11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan		Meningkatnya pengelolaan sampah yang responsiv gender							

			7. peraturan perundangan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional									
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah 2. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah		Terbinanya dan terawasinya pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta							

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DEN KELUARGA BERENCANA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG	Meningkatnya Pemberday	Meningkatnya Implementasi PPRG							

	GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN	pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	aan Perempuan								
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi 2. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Perempuan							

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan Kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Meningkatnya Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan								
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1. Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtP dan TPPO kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Layanan Pendampingan		Meningkatnya Pencegahan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan								

			Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota										
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2. monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Meningkatnya keluarga yang responsif gender dan hak anak								
4.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan anak	Meningkatnya kapasitas lembaga pemenuhan hak anak								
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan		Meningkatnya koordinasi pemenuhan hak anak								

		Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2. penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang ramah anak							
5.	PROGRAM PERLINDUNG AN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan		Meningkatnya Pencegahan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak							

			Kabupaten/Kota 3. Peningkatan Kapasitas SDM yang Terkait Langsung dengan Pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota										
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2. layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Meningkatnya Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak								
6.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1. Advokasi, Sosialisasi, dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal 2. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya keluarga berkualitas	Meningkatnya komunikasi, informasi, dan edukasi siaga kependudukan dan pendewasaan usia perkawinan								

			dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk										
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 3. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana		Meningkatnya komunikasi, informasi, dan edukasi siaga kependudukan dan pendewasaan usia perkawinan								
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 2. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Meningkatnya pemutakhiran data informasi keluarga								

			3. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 4. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 5. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga 6. Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain 7. Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)									
7.	PROGRAM PEMBINAAN	Pelaksanaan Advokasi,	1. Pengelolaan Operasional dan		Meningkatnya advokasi,							

	KELUARGA BERENCANA (KB)	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 2. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 3. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 4. Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta promosi program Bangga Kencana								
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	1. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 2. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Meningkatnya kualitas pembinaan PKB								

		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 3. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 4. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Meningkatnya kualitas pelayanan KB								
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	1. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung		Meningkatnya pembinaan terhadap Kampung KB								

		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Keluarga Berkualitas 2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas										
8.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 2. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 3. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan		Meningkatnya Pembinaan Keluarga Sejahtera Melalui Kelompok Kegiatan BKB dan BKL								

			Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)										
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 2. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 3. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)		Meningkatnya Pembinaan Keluarga Sejahtera Melalui Kelompok Kegiatan PIK R BKR dan UPPKA								

			Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))									
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) 2. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)		Meningkatnya peresentase pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga							
9.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH AN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelurahan	Terlaksananya Validasi Profil Kelurahan							
10.	PROGRAM PEMBERDAYA	Pemberdayaan Lembaga	1. Peningkatan Kapasitas		Terselenggaranya Pembinaan							

	AN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat 2. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan								
--	---	---	---	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk							

			Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kepend dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 2. Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil 3. Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil 4. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil										
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil								
3.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Layanan	Meningkatnya kualitas database kependudukan								

		Penyelenggaraa n Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 2. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 4. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjaw abkan	Publik	Meningkatnya kualitas database kependudukan							
4.	PROGRAM PENGELOLAA N PROFIL KEPENDUDUK AN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		Meningkatnya kualitas data Profil Kependudukan							

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	PROGRAM PENGEMBANG AN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	1. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi	Meningkat nya Kawasan Permukima	Meningkatnya Pendataan Rumah di Kawasan Rawan							

		Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 2. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	n Layak Huni	Bencana dan Berpotensi terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 2. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 3. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Meningkatnya pembangunan rumah sesuai aturan								
2.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman								

3.		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 3. Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 4. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman								
4.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		Meningkatnya cakupan masyarakat yang terdampak sosialisasi Pencegahan Kumuh								
5.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk		Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan lingkungan kawasan								

	UMUM (PSU)		Menunjang Fungsi Hunian 2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 3. Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 4. Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 5. Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 6. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Permukiman								
6.	PROGRAM PENATAGUNAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Penataan, Penguasaan dan Pemanfaatan Pertanahan								

DINAS KESEHATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 6. Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan anak 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya layanan Kesehatan keluarga dan Gizi masyarakat							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 2. Pengelolaan Pelayanan		Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, dan Lansia							

		Kabupaten/Kota	Kesehatan pada Usia Produktif 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 5. Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan										
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Operasional Pelayanan Puskesmas 2. Operasional Pelayanan 3. Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 7.		Meningkatnya Sistem Pelayanan Di Puskesmas Melalui Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer dengan Pendekatan Siklus Hidup								
2.	PROGRAM PEMENUHAN	Penyediaan Layanan	1. Pengelolaan Pelayanan		Meningkatnya Kualitas								

	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis 4. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria 6. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tular Zoonotik dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan								
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Meningkatnya Kualitas Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular								

			3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 6. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 7. Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok										
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa 2. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium rujukan/Nasional		Meningkatnya Surveilans penyakit, layanan imunisasi dan penanggulangan KLB								

			3. Pengelolaan Pelayanan Surveilans 4. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 6. Pengelolaan Layanan Imunisasi 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji										
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan								
3.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 2. Penyediaan dan		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan yang didukung pembiayaan efektif, sistem rujukan terintegrasi								

			Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 3. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Meningkatnya Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya								
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Meningkatnya Kualitas Data Kesehatan								
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Pembangunan Puskesmas 2. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3. Pengembangan Puskesmas 4. Pengembangan		Meningkatnya Pemenuhan Fasilitas Kesehatan								

[illegible]

[illegible]

			Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar										
		3. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan											
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Bidang/Profesi Kesehatan								
5.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Meningkatnya Apotek, Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT yang memiliki izin/rekomendasi								
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk		Meningkatnya Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan								

		Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Meningkatnya Tempat Pengelolaan Pangan yang memenuhi syarat							
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Meningkatnya Pemeriksaan Sarana Post Market dan Produk Industri Rumah Tangga Pangan							
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Advokasi, Pember- dayaan, Kemitraan,							

		Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Terlaksananya Implementasi Germas							
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Terlaksananya Upaya Revitalisasi UKBM							

DINAS SOSIAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Meningkatnya Kemandirian PPKS	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber dana sosial							

		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota 2. Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial 3. Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/ Kota 4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota 5. Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan		Meningkatnya kapasitas PSKS								
--	--	---	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

			Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi										
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Meningkatnya PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa permakanan, sandang, pendidikan dan kesehatan dasar								
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Penyediaan Alat Bantu 2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 4. Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan		Meningkatnya PPKS yang dipulihkan fungsi sosialnya								

			dengan Hukum (ABH) 5. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial										
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan		Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perbekalan kesehatan secara cepat dan tepat								
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 2. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Meningkatnya PPKS yang terhubung kembali dengan keluarga								
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 2. Pemberian Layanan Kedaruratan 3. Pemberian Layanan Rujukan		Meningkatnya PPKS yang terlayani permasalahan sosialnya								

		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4. Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitas Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis		Meningkatnya PPKS yang diberdayakan							
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 2. Pemberian Layanan Kedaruratan 3. Penyediaan Permakanan 4. Penyediaan Sandang 5. Penyediaan Alat Bantu 6. Penyediaan		Meningkatnya Pelayanan PPKS di Rumah Singgah							

[illegible]

			Layanan Rujukan 14. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 15. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 16. Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya 17. Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya										
3.	PROGRAM PERLINDUNG AN DAN	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Meningkatnya pemeliharaan anak-anak terlantar								

	JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya basis data kemiskinan							
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 4. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Terlaksananya verifikasi data kemiskinan sesuai standar							
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terpenuhinya kebutuhan PPKS	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber dana sosial							
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber dana sosial							

			2. Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial 3. Fasilitas Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota 4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota 5. Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi									
5.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Pemberian Akses		Meningkatnya PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa							

		Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		permakanan, sandang, pendidikan dan kesehatan dasar								
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Penyediaan Alat Bantu 2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 4. Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 5. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial		Meningkatnya PPKS yang dipulihkan fungsi sosialnya								
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Penyediaan Perbekalan Kesehatan		Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perbekalan								

		Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			kesehatan secara cepat dan tepat								
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Meningkatnya PPKS yang terhubung kembali dengan keluarga								
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 2. Pemberian Layanan Kedaruratan 3. Pemberian Layanan Rujukan 4. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan		Meningkatnya PPKS yang terlayani permasalahan sosialnya								

			Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota										
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis		Meningkatnya PPKS yang diberdayakan								
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 2. Pemberian Layanan Kedaruratan 3. Penyediaan Permakanan 4. Penyediaan Sandang 5. Penyediaan Alat Bantu 6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 8. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga		Meningkatnya Pelayanan PPKS di Rumah Singgah								

[illegible]

			Kabupaten/Kota 15. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 16. Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya 17. Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya									
6.	PROGRAM PERLINDUNG AN DAN JAMINAN	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rujukan Anak- Anak Terlantar		Meningkatnya pemeliharaan anak-anak terlantar							

	SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya basis data kemiskinan							
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya verifikasi data kemiskinan sesuai standar							
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Meningkatnya pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin							
7.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Makanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 4. Pelayanan Dukungan Psikososial 5. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Meningkatnya capaian SPM Kebencanaan							
		Penyelenggara n Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Meningkatnya kesiagaan bencana							

		Bencana Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana									
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DISKOP UKM DAN NAKER

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAA N KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat nya kualitas koperasi	Meningkatnya cakupan pengawasan lembaga koperasi							
2.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya cakupan Koperasi yang dibina dan dinilai kesehatannya		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							

3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Meningkatnya kompetensi SDM Pengelola Koperasi							
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASIAN	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi 2. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 3. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya pemberdayaan koperasi sektor riil							
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui	1. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan	Meningkatnya skala usaha mikro	Meningkatnya kompetensi wirausaha							

	USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Usaha Mikro 2. Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil 3. Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro 4. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro 5. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan									
6.		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 2. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik		Meningkatnya Pemasaran Produk Usaha Mikro							
7.	PROGRAM PENGEMBANG	Pengembangan Usaha Mikro	1. Penumbuhan dan		Meningkatnya pengembangan							

	AN UMKM	dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2. Pengembangan Kewirausahaan 2. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		usaha mikro								
8.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendayagunaan tenaga kerja daerah								
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Meningkatnya perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro								
9.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 2. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 3. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		Meningkatnya pencari kerja yang memiliki keahlian dan kemampuan kerja								

			bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi										
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Meningkatnya akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja swasta								
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Meningkatnya perusahaan menerapkan peningkatan produktivitas								
10.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja		Meningkatnya kualitas pembinaan kepada Bursa Kerja Khusus								
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 2. Job Fair/Bursa Kerja		Meningkatnya pelayanan pencari kerja								
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Meningkatnya kompetensi calon pekerja migran								
11.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 2. Penyelenggaraan		Meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan								

		Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		perundangan ketenagakerjaan								
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi		Meningkatnya ketenangan bekerja dan berusaha bagi pelaku industri								

			Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi									
			4. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota									
			5. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Meningkatnya kapasitas tenaga perpustakaan							

			Standar Nasional Perpustakaan 2. Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan										
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 3. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 4. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan		Meningkatnya lembaga literasi								

			Masyarakat									
2.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat 3. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 4. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Meningkatnya fasilitas Perpustakaan							
3.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 2. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Meningkatnya Pelestarian Naskah Kuno yang dilestarikan sebagai Khasanah							
4.	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Arsip Dinamis	1. Penciptaan dan Penggunaan	Meningkatnya tertib								

		Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota									
6.	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Meningkatnya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip							

INSPEKTORAT

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraa n Pengawasan Internal	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Kerja Sama Pengawasan Internal	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota	Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal							

			6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP										
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASA	Penyelenggaraa n Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING AN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Meningkatnya Kualitas Monitoring Rencana Aksi Pencegahan Korupsi								
4.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING AN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Meningkatnya Peran Serta Perangkat Daerah dalam Pembangunan Zona Integritas								
5.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING AN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Meningkatnya Profesional APIP dan Kualitas Penyusunan Rumusan kebijakan/ Fasilitas teknis di Bidang pengawasan								

6.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING AN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Meningkatnya Peran Serta Perangkat Daerah yang membuat Implimentasi Reformasi Birokrasi dan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja							
7.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING AN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Perangkat Daerah yang melakukan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah							

RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan	Meningkat nya Kinerja Pelayanan dan Keuangan Kesehatan Rumah Sakit	Jenis Pelayanan Kesehatan Perseorangan di RS yang terpenuhi sesuai standar							

			Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit	Persentase Peningkatan Kunjungan pada Layanan untuk UKP di RSD Idaman							

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Perda dan Perkada							
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap		Meningkatnya tindak lanjut terhadap Pelanggaran Perda Perkada							

			Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembentukan Sekretariat PPNS Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Meningkatnya Pembinaan PPNS kabupaten/kota								
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat								
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Meningkatnya Peran Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan Trantibum								

		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan 2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		Meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP dan Satlinmas								
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan		Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum								

			Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan 3. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum										
3.	PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULA NGAN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Meningkat nya penanggula ngan kebakaran dan penyelamat an masyarakat	Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran yang Ditindaklanjuti								
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 2. Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Meningkatnya Inspeksi peralatan proteksi kebakaran Ditindaklanjuti								
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran		Meningkatnya investigasi kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti								

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 2. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 3. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana 4. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran								
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa,		Meningkatnya Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap								

		Kondisi Membahayakan Manusia	Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		Bencana Non Kebakaran							
--	--	------------------------------	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

KECAMATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Koordinasi Kewilayahannya Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Musrenbang Kecamatan							
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang		Meningkatnya Kualitas Pelayanan							

		yang Dilimpahkan kepada Camat	terkait dengan Nonperizinan		Kesejahteraan Sosial							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Meningkatnya Kualitas Monitoring Ekonomi dan Pembangunan							
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Evaluasi Kelurahan		Meningkatnya Kualitas Kelurahan							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat							
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Meningkatnya Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							

4.	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Meningkatnya Kualitas Ketua RT/RW								
----	---	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD NAJIH

PIHAK KESATU,



ERNA LISA HALABY